

**PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH SESUAI PERATURAN PEMERINTAH NO.71
TAHUN 2010 TENTANG STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA DINAS
PENDAPATAN DAERAH DAN DINAS SOSIAL PROV. SULUT**

*GOVERNMENT'S FINANCIAL STATEMENT UNDER GOVERNMENT'S REGULATION NO.71 IN 2010 ABOUT
GOVERNMENT ACCOUNTING STANDARD AT DEPARTEMENT OF REVENUE AND
DEPARTEMENT OF SOCIAL NORTH SULAWESI*

Oleh:

**Ezra Paula Mentu¹
Jullie J. Sondakh²**

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado
email: ¹ezramentu@gmail.com
²julliesondakh@yahoo.com

Abstrak: Standar Akuntansi Pemerintahan adalah Prinsip Akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah merupakan gambaran dari kinerja Pemerintah Daerah dalam satu periode Akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010. Metode yang digunakan analisis deskriptif dimana data dikumpulkan kemudian diklasifikasikan dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan penyajian laporan keuangan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tahun anggaran 2014 dan 2015 belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010. Sebaiknya pada tahun anggaran berikutnya pimpinan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan PP No.71 Tahun 2010, agar akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dapat terwujud.

Kata kunci: standar akuntansi pemerintahan, laporan keuangan, akuntansi

Abstract: *Governmental Accounting Standard is the principle set out in preparing and presenting financial statement both central and local government. Government accounting standards will be regulated in government regulation No.71 in 2010, every the regional government financial report required to be properly according to applicable regulations. This study aims to determine whether the financial statement are present in Department of Revenue Area and Department of Sosial Services North Sulawesi is appropriate by Government Regulation No.71 in 2010. The analytical method used is descriptive in which the data has been collected and then classified and analyzed so that it the conclusions can be drawn. The result showed that the presentation of the financial statement Department of Revenue Area and Department of Sosial Service North Sulawesi in fiscal year 2014 and 2015 is not accordance with Government Regulation No.71 in 2010. Hopefully Department of Revenue Area and Department of Sosial Service North Sulawesi has applied PP No.71 in 2010 in preparing of financial statement.*

Keywords: government accounting standard, financial statement, accounting

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Seiring dengan reformasi di bidang keuangan negara, pentingnya dilakukan perubahan-perubahan untuk mendukung agar reformasi di bidang keuangan negara dapat berjalan dengan baik. Salah satu perubahan yang signifikan adalah perubahan di bidang akuntansi pemerintahan karena melalui proses akuntansi dihasilkan informasi keuangan yang tersedia bagi berbagai pihak untuk digunakan sesuai dengan tujuan masing-masing.

Dalam rangka menciptakan tata kelola yang baik (*good governance*), pemerintah Indonesia terus melakukan berbagai usaha untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Sebagai upaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara salah satunya adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan akuntansi pemerintah berupa standar akuntansi pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintah dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN berupa laporan keuangan yang setidaknya-tidaknya meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia. Pemerintah selanjutnya mengamanatkan tugas penyusunan standar tersebut kepada suatu komite standar independen yang ditetapkan dengan suatu keputusan presiden tentang komite standar akuntansi pemerintahan. Peraturan ini menjadi pedoman yang harus ditaati oleh setiap Daerah Otonom Kabupaten/Kota maupun Propinsi dalam menyajikan laporan keuangan berbasis akrual pada pemerintah daerahnya.

Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sesungguhnya adalah dalam rangka peningkatan kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibilitasnya pada giliran selanjutnya akan dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah sehingga *good governance* dapat tercapai secara efektif.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Sulawesi Utara sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dalam cara yang signifikan dan satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian di antaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya (Riahi-Belkaoui, 2011:50). Pontoh (2013:1) menyatakan akuntansi adalah sebuah sistem informasi yang mengukur aktivitas bisnis, pemrosesan data menjadi laporan, dan mengkomunikasikan hasilnya pada para pengambil keputusan. Dapat Disimpulkan Akuntansi adalah suatu sistem informasi yang membuat dan memberikan laporan kepada para pengguna informasi akuntansi.

Akuntansi Pemerintahan

Sujarweni (2015:18) menjelaskan bahwa Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dari anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. Akuntansi Pemerintahan termasuk pula akuntansi lembaga-lembaga nonprofit atau *institutional accounting*, mengkhususkan pada masalah pencatatan dan pelaporan transaksi dari unit-unit pemerintah dan organisasi nonprofit lainnya, seperti: mesjid, lembaga amal, yayasan, rumah sakit, dan lembaga-lembaga pendidikan. Fungsi akuntansi pemerintah adalah menyediakan laporan akuntansi yang bermanfaat mengenai aspek kepengurusan administrasi pemerintah, serta membantu manajemen dalam melaksanakan pengawasan atas pengeluaran melalui anggaran, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku (Sadeli, 2015:6). Dapat disimpulkan Akuntansi pemerintahan mengkhususkan dalam pencatatan dan pelaporan transaksi-transaksi yang terjadi di badan pemerintah. Akuntansi pemerintah laporan akuntansi tentang aspek kepengurusan dari administrasi keuangan Negara.

Standar Akuntansi Pemerintahan

PP No. 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat (3) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, standar akuntansi pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan dan dasar yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Peranan Pelaporan Keuangan

Hariadi, Restianto, & Bawono (2010:122) menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Suatu entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antargenerasi dan evaluasi kinerja.

Tujuan Pelaporan Keuangan Daerah

Dalam Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dijelaskan mengenai tujuan pelaporan keuangan daerah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Penyajian Laporan Keuangan Menurut PP 71 Tahun 2010

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/ABPD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah. Unsur-unsurnya yaitu pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan perubahan saldo anggaran lebih menyajiakan secara komparatif dengan periode sebelumnya dengan pos-pos sebagai berikut:

1. Saldo Anggaran Lebih awal;
2. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
3. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun sebelumnya;
5. Dan lain-lain;
6. Saldo Anggaran Lebih Akhir;

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang kurangnya pos-pos:

1. Ekuitas awal;
2. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreaksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - a. Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - b. Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap
4. Ekuitas akhir.

Disamping itu, suatu entitas pelaporan menyajikan rincian lebih lanjut dari unsur-unsur yang terdapat dalam Laporan Perubahan Ekuitas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar

Penelitian Terdahulu

1. Manangkalangi (2013) Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Tujuan dari penelitian adalah Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP). Metode yaitu Analisis Deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2011 pemerintah sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen. 13 tahun 2006. Na-mun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri No 29 tahun 2002.
2. Rintiani (2014) Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. Tujuan dari penelitian Bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Laporan Keuangan Daerah Pemerintah. Metode yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan tahun 2013 diketahui bahwa Kota Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar penyusunan laporan keuangan yang telah diatur pada PP nomor 71 tahun 2010.

3. Langelo (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung. Tujuan dari penelitian ini Untuk mengetahui penyajian laporan keuangan dan kesiapan pemerintah Kota Bitung dalam menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan Tahun anggaran 2011 pemerintah Sulawesi utara sesuai dengan SAP tahun 2005 dan telah berpedoman pada Permen 13 tahun 2006. Namun dalam LRA dan LAK masih menggunakan Kepmendagri No 29 tahun 2002. Kesiapan Laporan keuangan kota bitung masih mengacu pada peraturan lama dimana berbasis CTA. Disebut CTA karena untuk realisasi anggaran masih berbasis kas sedangkan neraca berbasis akrua.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu berupa studi kasus dan studi pustaka. Metode penelitian Kualitatif adalah metode yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan data secara *purposive*, analisa data bersifat induktif/kualitatif (Sugiyono, 2010:13)

Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian bertempat di Dinas Pendapatan Daerah di Jl. 17 Agustus No. 69 Manado dan Dinas Sosial di Jl. Pingkan Matindas No. 125 Pall Dua Manado. Waktu penelitian dimulai pada bulan Desember tahun 2015 sampai dengan bulan Februari tahun 2016.

Prosedur Penelitian

Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Persiapan dari pencarian judul
2. Disposisi Pemimpin untuk ke objek
3. Pengumpulan Data untuk diolah
4. Analisa Data Penelitian
5. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Jenis Data

Sugiyono (2010:13) menjelaskan bahwa dalam penelitian ada dua jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif dan data kualitatif.

1. Data kuantitatif, dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positif, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.
2. Data kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk kata-kata yang mengandung makna dan tidak dapat dikuantitatifkan. Jenis data seperti ini berupa sejarah dinas, struktur organisasi, dan informasi relevan lainnya.

Sumber Data

1. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen.

Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi
2. Metode Wawancara
3. Metode Dokumentasi

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif yaitu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan, serta menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang penyajian laporan keuangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Objek Penelitian

Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara dibentuk pada Tahun 1962 dengan nama Kantor Pajak, yang saat ini merupakan bagian dari pemerintahan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara – Tengah. Seiring dengan perkembangan organisasi, pada Tahun 1984 Kantor Inspeksi Pajak berubah menjadi Dinas dengan nama Dinas Pajak dan Pendapatan. Pada Tahun 2008 dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, maka Dinas Pendapatan menjadi Dinas Pendapatan Daerah. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonom dan tugas pembantuan dibidang sosial. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara merupakan salah satu SKPD yang ada di Sulawesi Utara.

Hasil Penelitian

Proses akuntansi keuangan daerah umumnya terdiri dari tahap pencatatan, penggolongan dan tahap pelaporan. Begitu pula dengan laporan keuangan yang dihasilkan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial masih berdasarkan laporan keuangan berbasis *Cash Towards Acrual* dimana setiap SKPD hanya menyajikan 2 laporan keuangan yaitu neraca dan laporan realisasi anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara dalam hal penyajian laporan keuangan mempunyai kesamaan yang membedakan yaitu angka-angka dalam anggaran dan realisasi. Klasifik pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah. Klasifikasi belanja menurut jenis belanja yang meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Neraca

Neraca Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sama-sama menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Klasifikasi aset terdiri dari aset lancar dan aset non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk tujuan dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan atau persediaan. Aset non lancar diklasifikasikan meliputi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya. Investasi jangka panjang dibagi atas Investasi non permanen dan investasi pemanen. Klasifikasi pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Klasifikasi ekuitas dana meliputi ekuitas dana lancar (termasuk SILPA), ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan.

Catatan atas Laporan Keuangan

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;
2. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

3. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut
4. kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
5. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
6. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
7. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
8. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

Pembahasan

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa Penyajian Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara masih mengikuti PP Nomor 24 Tahun 2005 (*caso to accrual*) dan belum mengikuti PP 71 Tahun 2010 (*accrual basis*). Menurut Peraturan Pemerintah 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang penyajian laporan keuangan, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terdapat 7 laporan yaitu: (1) Neraca, (2) Laporan Realisasi Anggaran, (3) Laporan Perubahan Saldo, (4) Laporan Operasional, (5) Laporan Arus Kas, (6) Laporan Perubahan Ekuitas dan (7) Catatan atas Laporan Keuangan. Sedangkan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Sulawesi Utara hanya menyajikan Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun dalam penyajian tiap laporan seperti Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Langelo (2015) dengan judul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kota Bitung menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bitung belum menerapkan PP.71 Tahun 2010, terdapat kendala-kendala dalam kesiapan berupa jumlah sumber daya manusia masih belum cukup siap. Dari hasil penelitian Manangkalangi (2013) dengan judul Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara disimpulkan bahwa laporan keuangan pemerintah Sulawesi Utara belum sesuai dengan PP.71 Tahun 2010.

Hasil penelitian yang dilakukan pada Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara tentang penyajian laporan keuangan terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan, selanjutnya di bandingkan kesesuaiannya dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pada Laporan Realisasi Anggaran Dinas Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 dan Dinas Sosial tahun anggaran 2015 secara keseluruhan telah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dalam penyajian Pendapatan dan Belanja. Hanya saja Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial tidak menyajikan pos transfer dan pembiayaan karena dalam PP 71 tahun 2010 Transfer adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah. Sedangkan Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

Pada Neraca Dinas Pendapatan Daerah tahun anggaran 2014 dan Dinas Sosial tahun anggaran 2015 Provinsi Sulawesi Utara secara keseluruhan sudah sepenuhnya mengikuti PP Nomor 71 Tahun 2010. Penyajian aset telah disajikan menurut klasifikasi aset lancar dan non lancar. Penyajian kewajiban telah disajikan menurut klasifikasi kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek. Dalam hal pengklasifikasian ekuitas secara terpisah menjadi ekuitas dana lancar, ekuitas investasi dan ekuitas dana cadangan tidak sesuai dengan PSAP No. 1 ayat 84 dalam PP 71 Tahun 2010 yang merangkum semua kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban menjadi ekuitas. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan setiap entitas wajib menyajikan CaLK sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara yang menjelaskan mengenai pendahuluan, ekonomi makro, kebijakan akuntansi yang penting dan penjelasan pos-pos laporan keuangan telah mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 4.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Laporan Keuangan Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Dalam tahun anggaran 2014 Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.
3. Dalam tahun anggaran 2015 Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara penyajian laporan keuangannya belum menerapkan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dan masih menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.

Saran

Saran yang dapat diberikan adalah:

1. Kiranya untuk tahun anggaran berikutnya, hendaknya Dinas Pendapatan Daerah dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Utara sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam menyajikan laporan keuangan. Agar Pengelolaan Keuangan dapat berwujud dengan efektif dan efisien serta dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan
2. Selain itu untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa dinas-dinas lain agar dapat menggambarkan secara umum dan luas penyajian laporan keuangan pemerintah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Hariadi, P., Restianto, Y. & Bawono, I, 2010. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Langelo, Friska. 2015. Analisis Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual dalam Penyajian Laporan Keuangan pada Pemerintah di Kota Bitung. *Jurnal EMBA* Vol. 3 No. 1 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/6556/6080>. Diakses 8 April 2016. Hal. 1-8.
- Manangkalangi, Kurniawan. 2013. Analisis Penyajian Laporan Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA* Vol. 1 No. 3 <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1936/1533>. Diakses 8 April 2016. Hal. 22-31.
- Pontoh, Winston. 2013. *Akuntansi konsep dan Aplikasi*. Halaman Moeka. Jakarta
- Pemerintah Republik Indonesia. 2010. *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta
- Riahi-Belkaoui. 2011. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat. Jakarta.
- Rintiani, Wasik. 2014. Evaluasi Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Surabaya Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010. *Jurnal Akuntansi* Vol. 3 No. 1 <http://ejournal.unesa.ac.id/index.php/jurnal-akuntansi/article/view/11232>. Diakses 8 April 2016. Hal. 1-18.
- Sadeli, Lili M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. CV Alfabeta. Bandung.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta.